

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

Jailani Rahimy Karepesina

NPP. 32.1000

Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : jailanirahimykarepesina@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Isman Hadijaya, S.AP.,M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Central Maluku District faces serious challenges in food security in 2024, resulting in rising food prices. Improving food infrastructure is urgent given the projected future needs that are increasingly large and diverse, influenced by population growth and the impact of climate change on agricultural production. Purpose : . This study aims to analyze the role of the Food Security Office of Central Maluku Regency in improving regional food security, identify obstacles faced, and evaluate efforts made to overcome these obstacles. Methods: This study used a qualitative approach with criterion based selection technique. Data collection was carried out by in-depth interviews with 7 key informants representing policy makers, business actors, and the community and complemented by documentation and observation. The data obtained was then analyzed using the Nvivo 12 Plus application with thematic analysis techniques. Results : The research identified a decrease in food production starting from 2020-2024 in all crops except morning sawa, in the government sector the relevant agencies also showed a decrease in the target score of the expected food pattern by 15% starting from 2023-2024. In the research, it can also be found that employees of the Food Security Service experience excessive workload due to lack of employees, the budget disbursed by the government in overcoming food security problems also does not meet the target. The condition of the roads used as a means of distribution is also classified as unfit with a massive increase in damaged roads. Conclusion: Based on the results of the analysis that has been carried out by researchers, it can be concluded that the role of the Food Security Service in improving regional food security has not been maximized, this is triggered by various obstacles ranging from internal constraints in the form of human resources and agency budgets, there are also external constraints in the form of regional geographical conditions and erratic climate. However, the Food Security Service continues to implement programs to overcome these obstacles such as the creation of community food barns and government food reserves.*

Keyword : Role, Food Security, Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Maluku Tengah menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan pada tahun 2024 yang mengakibatkan pada kenaikan harga bahan pangan. Peningkatan infrastruktur pangan menjadi urgensi mengingat proyeksi kebutuhan di masa depan yang semakin besar dan beragam, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. **Tujuan:** . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik *criterion based selection*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan kunci yang mewakili pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat serta dilengkapi dengan dokumentasi serta observasi. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus* dengan teknik analisis tematik. **Hasil/Temuan:** Penelitian mengidentifikasi penurunan produksi pangan mulai dari tahun 2020-2024 pada semua tanaman pangan kecuali padi sawa, pada sektor pemerintah dinas terkait juga menunjukkan penurunan target skor pola pangan harapan sebesar 15% mulai dari tahun 2023-2024. Dalam penelitian juga dapat terdapat temuan bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan mengalami penumpukan beban kerja yang berlebih karena kurangnya pegawai, anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam mengatasi masalah ketahanan pangan juga kurang memenuhi target. Kondisi jalan yang digunakan sebagai sarana distribusi juga banyak yang tergolong tidak layak dengan adanya peningkatan jalan rusak yang masif. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah belum maksimal, hal ini dipicu berbagai kendala mulai dari kendala internal berupa sumber daya manusia dan anggaran dinas, ada juga kendala eksternal berupa kondisi geografis daerah dan iklim yang tidak menentu. Namun Dinas Ketahanan Pangan tetap berupaya melaksanakan program untuk mengatasi kendala tersebut seperti pembuatan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah.

Kata Kunci : Peran, Ketahanan Pangan, Kebijakan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 500.05-537 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Bupati Maluku Tengah selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Maluku Tengah untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Tim Salah satu anggota Tim tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan yang melakukan pengendalian inflasi dari sektor urusan wajib ketahanan pangan. Salah satu hal yang menyebabkan Inflasi adalah berkaitan dengan harga pangan, Menurut Guntur (2010) Harga merupakan nilai moneter yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau dapat pula diartikan sebagai besaran nilai yang dipertukarkan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan maupun pemanfaatan suatu produk/jasa. Harga pangan ini tentu saja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan sektor produksi pangan masyarakat. dengan meningkatnya inflasi, maka pemerintah perlu memperhatikan harga pangan yang beredar di masyarakat salah satunya di Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Maluku Tengah juga memiliki Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani serta melaksanakan tugas dan fungsi untuk masalah ketahanan pangan yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. Ketahanan pangan sendiri selalu menjadi isu dalam pembangunan nasional Indonesia. dari jaman orde lama, orde baru hingga sekarang (Salasa , 2021).

Pemerintah Indonesia telah memasukkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ke dalam wacana nasionalnya, dengan yang terakhir ini digunakan untuk memperkuat kontrol negara dan kemandirian pangan nasional (Neilson & Wright, 2017). Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana keamanan pangan, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap ketersediaan pangan berdasarkan kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas nasional pemerintah, seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015 -2019 di mana pemerintah Indonesia melihat masalah ini sebagai masalah yang kompleks dan multidimensi yang tidak hanya terkait dengan kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan pokok, namun juga kebijakan untuk menstabilkan harga pangan, meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan, dan memitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan (Makbul et al., 2019). Peningkatan infrastruktur pangan menjadi urgensi mengingat proyeksi kebutuhan di masa depan yang semakin besar dan beragam, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Perkembangan inflasi di wilayah ini menunjukkan tren positif, dimana pada Januari 2024 tercatat 6,46%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 3,26% di Februari (meski masih tertinggi di Provinsi Maluku saat itu), terus menurun mencapai 1,01 pada Mei 2024 menjadikan Maluku Tengah sebagai wilayah dengan inflasi terendah di Maluku sekaligus masuk 10 besar nasional. Capaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah melalui berbagai langkah strategis seperti rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi, pemberian subsidi harga bahan pokok secara konsisten, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Gerai TPID secara berkala, yang secara kolektif berhasil menciptakan stabilitas harga pangan di wilayah tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ketahanan pangan diberbagai wilayah di Indonesia dan dunia. Namun, terdapat beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang perlu diatasi, Sebagian besar penelitian ketahanan pangan dilakukan di wilayah daratan atau perkotaan dengan akses logistik yang stabil. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah

memiliki kondisi geografis kepulauan yang unik, terpencil, dan rawan terhadap gangguan distribusi. Konteks ini belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya hanya menjelaskan pelaksanaan program ketahanan pangan secara umum. Penelitian ini menganalisis lebih dalam dengan menggunakan teori peran dari Siagian dalam kuncoro (2004) yang mengatakan bahwa peran pemerintah terdiri atas wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Hal ini terutama menjadi masalah di negara-negara yang rawan pangan, di mana penekanan yang berlebihan pada pengurangan tekanan lingkungan dapat membatasi kapasitas produksi pertanian-pangan, sehingga membahayakan pasokan pangan dan kesejahteraan manusia. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat kuantitatif deskriptif. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik berbantuan aplikasi *NVivo 12 Plus*, yang memungkinkan eksplorasi data yang lebih dalam, visualisasi hubungan antar-tema, dan pelacakan narasi yang lebih utuh dari informan. Sebagian besar studi fokus pada ketahanan pangan dari segi produksi atau konsumsi semata. Penelitian ini secara khusus mengangkat peran institusi daerah dalam konteks kebijakan dan program ketahanan pangan, yang masih minim dibahas secara sistematis dalam literatur. Banyak studi mengambil perspektif teknis atau ekonomi. Penelitian ini mengambil perspektif ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya pada bagaimana organisasi pemerintahan daerah menjalankan fungsinya dalam menjamin ketahanan pangan di tengah krisis inflasi dan tantangan geografis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Metode pemetaan dalam memetakan penelitian terdahulu adalah metode *Systematic Literatur Review*. Proses pemetaan dilakukan secara sistematis menggunakan metode *Systematic Mapping Study (SMS)*, yang merupakan salah satu bentuk dari *Systematic Literature Review (SLR)*. Dalam konteks penelitian ini, metode SMS dianggap sangat sesuai karena mampu memetakan studi-studi terdahulu berdasarkan kajian dan cakupannya yang luas, sehingga dapat mengidentifikasi temuan-temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya” Kitchenham (2007). yang dilakukan pada penelitian Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai studi sebelumnya mengenai ketahanan pangan dan peran institusi pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian Hening Febriana (2012) di Kabupaten Tangerang, skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan belum berjalan maksimal, terutama dalam pemanfaatan potensi pangan lokal dan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian Robby Mardino (2021) di Provinsi Jambi menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam program ketahanan pangan, namun berbeda dengan temuan Anda karena di Kabupaten Maluku Tengah koordinasi antarsektor belum berjalan secara optimal di tingkat pelaksanaan teknis. Lailatul Apsari (2022) yang mengkaji peran Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa keterbatasan interaksi masyarakat menjadi hambatan utama, hal yang juga dirasakan di Maluku Tengah di mana pelibatan masyarakat masih belum menyeluruh.

Selanjutnya, jurnal oleh M. Amin dkk. (2024) yang berjudul *Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Indonesia* memperkuat temuan skripsi ini dengan menunjukkan bahwa ketahanan pangan di daerah rawan seperti NTB dan NTT dipengaruhi oleh akses logistik dan iklim yang tidak stabil, kondisi yang sangat relevan dengan konteks Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, jurnal Mgs Ismail (2022) mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, kesiapan aparatur, dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini memiliki benang merah dengan penelitian Anda yang juga

menemukan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Baik dalam konteks kependudukan maupun ketahanan pangan, kinerja pelayanan publik sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kemampuan SDM, serta pendekatan partisipatif yang kontekstual.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan ilmiah yaitu Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintahan dari Siagian (1992) yang mencakup dimensi wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Teori ini belum banyak digunakan dalam kajian ketahanan pangan, khususnya dalam konteks peran organisasi perangkat daerah (OPD). Pendekatan Kualitatif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deduktif, yang memungkinkan penelusuran lebih mendalam terhadap proses kebijakan, pengalaman aktor, dan dinamika kelembagaan. Analisis Komprehensif Data dianalisis menggunakan analisis tematik berbantuan aplikasi *NVivo 12 Plus* yang memungkinkan pemetaan isu secara visual dan tematik. Hal ini memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, serta peran Dinas Ketahanan Pangan dalam konteks daerah kepulauan. Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Penelitian ini tidak hanya memaparkan kondisi empiris, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan di lapangan serta dimensi peran pemerintah, yang dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola ketahanan pangan di masa mendatang.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan serta untuk mengidentifikasi kendala dan upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan.

II METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut simangunsong (2016), bahwa alasan penelitian kualitatif memiliki begitu yang berbeda dalam desain penelitian adalah karena dapat mengakomodasi fitur-fitur yang muncul dari bentuk alami penelitian kualitatif. Dengan Teknik *criterion based selection* yang merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan kunci yang mewakili pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat serta dilengkapi dengan dokumentasi serta observasi. Paradigma yang akan digunakan pada penelitian ini adalah paradigma post positivisme. Menurut Creswell (2016), Aliran post-positivisme berpendapat bahwa hubungan kausal antara faktor penyebab dan dampak yang dihasilkan dapat diidentifikasi secara empiris. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus* dengan teknik analisis tematik. Ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan yang mirip dengan Microsoft Office, yang memungkinkan peneliti untuk mengatur, mengurutkan, dan mengklasifikasikan data secara efisien (Castleberry, 2014 .) *NVivo* meningkatkan transparansi dan ketelitian dalam sintesis bukti kualitatif, memungkinkan penyaringan sistematis, ekstraksi data, sintesis, dan penilaian kritis (Houghton et al., 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah memainkan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui empat dimensi peran sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1992).

1. Peran sebagai wirausaha, yang ditunjukkan melalui inisiatif program-program seperti Gerakan Pangan Murah dan penguatan cadangan pangan pemerintah. Program ini bertujuan menstabilkan harga bahan pokok dengan menyediakan bahan pangan pokok di bawah harga pasar, terutama di daerah yang mengalami tekanan inflasi tinggi. Selain itu, dinas juga mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal, seperti produksi cabai dan tanaman pangan rumah tangga, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas.

2. Peran sebagai koordinator, di mana Dinas Ketahanan Pangan mengambil bagian aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam perannya ini, dinas berfungsi sebagai penghubung antar sektor, mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan dengan OPD lain seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian. Dinas juga berperan dalam penyusunan strategi ketahanan pangan daerah dan merancang intervensi kebijakan berbasis data dari Badan Pusat Statistik dan survei lapangan. Melalui koordinasi ini, terjadi integrasi antara program dinas dan upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi.

3. Peran sebagai fasilitator, yang diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan. Fasilitasi ini mencakup pembentukan gerai pangan murah, penyediaan sarana distribusi antar pulau, serta kegiatan pasar murah yang rutin dilaksanakan di wilayah rentan pangan. Dinas juga memfasilitasi berbagai kegiatan komunitas, seperti penyuluhan dan pelatihan pengolahan bahan pangan lokal agar masyarakat mampu mengolah hasil pertanian secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Peran sebagai stimulator, yaitu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pangan lokal. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas petani, pelaku UMKM pangan, serta ibu rumah tangga dalam rangka diversifikasi pangan dan peningkatan gizi keluarga. Selain itu, dinas berperan dalam mempromosikan kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, LSM, dan kelompok tani, khususnya dalam kegiatan distribusi pangan, pendampingan produksi, dan penyediaan input pertanian.

Secara keseluruhan, keempat dimensi peran ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketahanan pangan di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan iklim yang kompleks. Hal ini didukung oleh data dari rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan yang menunjukkan capaian kinerja program hingga 85%, sebagai indikator keberhasilan sebagian besar intervensi yang dilakukan.

3.2. Kendala dalam meningkatkan ketahanan pangan

Dalam pelaksanaan program-program ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi internal kelembagaan maupun faktor eksternal. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas program serta daya jangkau kegiatan terhadap masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan rawan pangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Berdasarkan data APBD tahun 2024, alokasi untuk Dinas Ketahanan Pangan hanya sekitar Rp 2,4 miliar. Anggaran tersebut harus mencakup seluruh program ketahanan pangan, mulai dari pengawasan distribusi, penyelenggaraan pasar murah, penyediaan cadangan pangan, hingga pelatihan masyarakat. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tantangan geografis Kabupaten Maluku Tengah, angka ini sangat tidak memadai. Minimnya anggaran membuat banyak kegiatan strategis tidak dapat direalisasikan secara maksimal, terutama program intervensi harga dan distribusi pangan ke pulau-pulau kecil yang memerlukan biaya logistik tinggi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan besar. dalam skripsi ini, sebagian besar ASN di Dinas Ketahanan Pangan hanya berpendidikan sarjana (S1) dan belum banyak yang mengikuti pelatihan teknis atau manajerial terkait sistem ketahanan pangan. Kurangnya pelatihan menyebabkan pelaksanaan program seringkali tidak tepat sasaran atau tidak inovatif dalam menghadapi dinamika di lapangan. SDM yang tersedia juga belum merata dalam hal kemampuan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta komunikasi lintas sektor yang menjadi kebutuhan penting dalam konteks kerja lintas OPD. Kendala berikutnya bersifat geografis. Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah kepulauan yang tersebar, dengan beberapa wilayah sulit dijangkau terutama saat musim ombak tinggi atau cuaca ekstrem. Masalah aksesibilitas dan logistik distribusi pangan menjadi sangat krusial. Dinas sering kali mengalami keterlambatan dalam mengirimkan bahan pangan ke daerah tertentu, yang menyebabkan ketimpangan pasokan dan harga yang tinggi di wilayah tersebut. Ketika distribusi terganggu, masyarakat lokal menjadi sangat rentan terhadap krisis pangan, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana atau krisis iklim. Di sisi lain, tantangan iklim dan cuaca ekstrem juga memberi dampak signifikan. Musim hujan yang berkepanjangan, gelombang tinggi laut, serta fenomena cuaca seperti La Nina membuat proses distribusi pangan dan hasil pertanian terganggu. Lahan pertanian menjadi rentan gagal panen, sementara pengiriman logistik pangan dari luar kabupaten menjadi tidak pasti. Ini memperburuk ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, dan membuat program diversifikasi pangan lokal sulit dilakukan secara stabil.

3.3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah telah merespons berbagai kendala tersebut dengan menyusun dan menjalankan sejumlah upaya strategis yang bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan operasional. Langkah-langkah ini dilakukan melalui kombinasi pendekatan kelembagaan, kebijakan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran, dinas melakukan refocusing program prioritas dan mengajukan skema pembiayaan lintas sektor. Beberapa kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan OPD lain, seperti kegiatan distribusi bersama Dinas Perdagangan, atau pelatihan petani bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Selain itu, Dinas juga mulai membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk mendukung distribusi pangan dan edukasi ketahanan pangan. Kolaborasi ini mencakup program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung logistik pangan murah ke wilayah sulit dijangkau. Kedua, dalam menghadapi keterbatasan SDM, dinas mulai melakukan pelatihan teknis internal

bagi pegawai, termasuk pelatihan pemanfaatan sistem informasi pangan dan peningkatan kapasitas analisis kebijakan. Dalam kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, beberapa staf juga dikirim mengikuti pelatihan tematik seperti sistem cadangan pangan, manajemen logistik, dan pengolahan pangan lokal. Di sisi lain, tenaga pendamping masyarakat seperti penyuluh pertanian juga dilibatkan lebih aktif dalam program pangan lestari untuk menjangkau wilayah desa secara langsung.

Untuk kendala geografis dan iklim, dinas memperkuat infrastruktur distribusi dan sistem cadangan pangan. Salah satu inovasi adalah penggunaan gudang kecil berbasis desa dan sistem subsidi transportasi antarpulau, terutama untuk bahan pangan pokok. Pemerintah daerah juga memfasilitasi penggunaan kapal kecil milik swasta untuk menjamin kelancaran pasokan pangan ke pulau-pulau terluar. Beberapa wilayah juga mulai memanfaatkan teknologi pengeringan dan pengawetan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan segar dari luar daerah. Selain itu, upaya penguatan cadangan pangan daerah (CPPD) dilakukan melalui pengadaan cadangan pangan strategis yang ditempatkan di beberapa titik desa yang rawan pangan. Dengan sistem distribusi berbasis permintaan (demand-driven), cadangan ini bisa segera digunakan saat terjadi krisis atau keterlambatan pasokan, seperti saat bencana atau gagal panen. Tidak kalah penting, dinas juga berupaya menguatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Forum-forum konsultasi publik, musyawarah desa, dan pertemuan lintas OPD digunakan untuk menyinergikan kegiatan pangan dan menyamakan arah kebijakan. Dengan memperkuat partisipasi warga dan pelaku pasar lokal, program dinas menjadi lebih kontekstual dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah belum berjalan secara optimal pada seluruh dimensi. Sama halnya dengan temuan Hening Febriana (2012) yang meneliti strategi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun program-program ketahanan pangan telah dirancang, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor yang belum efektif. Sama halnya dengan temuan penelitian Nurul Hidayati (2021) yang juga menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, seperti perencanaan yang belum komprehensif, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya dukung SDM.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Aprilia (2020), penelitian tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berbasis masyarakat dapat berjalan secara efektif jika diiringi dengan dukungan kelembagaan yang kuat, pelibatan aktif masyarakat, dan monitoring yang berkelanjutan. Sementara dalam konteks Kabupaten Maluku Tengah, keterlibatan masyarakat masih terbatas dan pelatihan tidak dilaksanakan secara masif. Ini menunjukkan bahwa strategi top-down dari dinas belum sepenuhnya menghasilkan efek jangka panjang dalam memberdayakan komunitas lokal. Berbeda dengan temuan Robby Mardino (2021) yang menyatakan bahwa fungsi kelembagaan ketahanan pangan di Provinsi Jambi telah berjalan secara optimal dengan kolaborasi yang solid antar instansi, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Maluku Tengah masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek teknis yang lebih dalam, terutama dalam pengelolaan distribusi pangan dan pengendalian harga.

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Lailatul Apsari (2022) yang meneliti peran Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram dalam masa pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan program ketahanan pangan banyak mengalami hambatan karena keterbatasan infrastruktur dan daya dukung wilayah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi

geografis dan iklim di wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang membuat distribusi pangan tidak merata dan harga pangan fluktuatif. Namun, Penelitian ini menolak sebagian temuan dari penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa peran dinas ketahanan pangan cukup berhasil dalam menstabilkan ketersediaan dan harga pangan. Penolakan ini didasarkan pada perbedaan karakteristik wilayah penelitian. Kabupaten Maluku Tengah yang berbentuk kepulauan memiliki tantangan logistik dan geografis yang jauh lebih kompleks dibanding daerah dataran seperti Tangerang atau Mataram, sehingga pendekatan yang sama belum tentu memberikan hasil serupa. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat urgensi pentingnya pendekatan kontekstual dalam merancang kebijakan dan program ketahanan pangan, terutama pada wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang seperti daerah kepulauan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal, masih adanya keluhan masyarakat terkait harga bahan pokok, serta pelatihan kepada masyarakat yang belum dilakukan secara masif. Meski begitu, peran dinas sebagai fasilitator dan stimulator telah menunjukkan kemajuan, seperti tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi lapangan serta pelaksanaan pasar murah dan kerja sama lintas sektor yang aktif dilakukan.

Adapun kendala yang dihadapi terdiri dari kendala internal seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kendala eksternal berupa kondisi geografis kepulauan dan faktor iklim yang mempengaruhi distribusi dan produksi pangan. Untuk menjawab kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya seperti menjalin kerja sama lintas sektor, memprioritaskan program berdampak langsung bagi masyarakat, membangun lumbung pangan, serta memperkuat cadangan pangan khususnya di wilayah rawan pangan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari Masyarakat, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku atau di wilayah Indonesia Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., Suryadi, H., & Munandar, I. (2024). Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Governansi Praja*, 8(1), 45–60. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5113>

- Apsari, Lailatul. (2022). Implementasi Peran Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Masa Pandemic covid-19 di kota mataram. Mataram:UMM. <https://repository.ummat.ac.id/7718/>
- Castleberry, A. (2014). NVivo 10 [software program]. Version 10. QSR International; 2012. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 78(1), 1–2.
- Creswell J. W. (2016). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar. <https://mylibrary.umy.ac.id/koleksi/view/83484/>
- Febriana, Hening. (2019). Strategi Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang. Serang: USAT <https://eprints.untirta.ac.id/1304/>
- Guntur, M. E. (2010). Transformasi Pemasaran. Jakarta : Sagung Seto.
- Houghton, C., Murphy, K., Shaw, D., & Casey, D. (2017). Qualitative case study data analysis: An example from practice. *Nurse Researcher*, 24(5), 8–12. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25976531/>
- Ismail, Mgs., & Ismail, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Registratie*, 4(1), 22–31. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2429>
- Kitchenham & Charters, 2007. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE, January 2007, 1–57 https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/cxrk5>
- Makbul, Y., Faoziyah, U., Ratnaningtyas, S., & Kombaitan, B. (2019). Infrastructure development and food security in Indonesia: The impact of the trans-Java toll road on rice paddy farmers' desire to sell farmland. *Journal of Regional and City Planning*, 30(2), 140–156.
- Mardino, J Robby. (2012). Fungsi Dinas Ketahanan Provinsi Jambi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Pangan. Jambi: UNJA. <https://repository.unja.ac.id/24146/>
- Neilson, J., & Wright, J. (2017). The state and food security discourses of Indonesia: feeding the bangsa. *Geographical Research*, 55(2), 131–143. https://www.researchgate.net/publication/314249690_The_state_and_food_security_discourses_of_Indonesia_feeding_the_bangsa_Food_security_Indonesia
- Salasa, Andi Rachman (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. Surabaya : UNAIR. <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/view/29357>
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. In Simangunsong Fernandes (Ed.), Alfabeta (Kesatu). Alfabeta.